JUDICIAL REVIEW TAP MPR RI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) 1945 MENURUT JIMLI ASSDIDDIQIE

M. Sholihuddin Amin

Sekolah Menengah Pertama Trikarya, Jl. Sikatan III Manukan Tandes Surabaya |
saladdinamin22@yahoo.co.id

Abstract: This article discusses about Jimli Asshiddiqie thinking about of MPR RI judicial review against the Constitution 1945. According to Jimli Asshiddiqie, eighth of Tap MPR/S is must be considered equivalent position with the law, because in our legal system was no longer recognized the existence of law products above the law, even though the form of law not the Consideration, but materially eighth of Tap MPR RI is Law. And when the Decree of MPR/S assessed has caused the loss of constitutional rights of certain parties, it can be requested testing (*judicial review*) in the Constitutional Court, as a constitutional test case stipulated in Law No. 24 of 2003 about Constitutional Court. In political jurisprudence perspective, authority of the Constitutional Court in resolving cases of judicial review Tap MPR against the Constitution 1945 as Jimli Asshiddiqie thought, has some similarities with the agency *wilayah mazalim*, the authorities is investigate and examine cases public beneficiaries are that can't be carried by *hisbah* officers. In a formal legal framework in Indonesia, *wilayah mazalim* can be equated to the Constitutional Court.

Keywords: Judicial review, MPR, Jimli Asshiddiqie, political jurisprudence.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang pemikiran Jimli Asshiddiqie tentang *judicial review* Tap MPR RI terhadap UUD 1945. Menurut Jimli Asshiddiqie, kedelapan Tap MPR/S yang tersisa harus dianggap setara kedudukannya dengan undang-undang, karena dalam sistem hukum kita memang tidak lagi dikenal adanya produk hukum di atas undang-undang, meskipun bentuk formilnya bukan Undang-undang, tetapi secara materiil kedelapan Tap MPR RI tersebut adalah Undang-undang. Dan ketika Ketetapan MPR/S dinilai telah menimbulkan kerugian hak konstitusional pihak-pihak tertentu, maka dapat

dimintakan pengujian (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi, sebagai perkara pengujian konstitusional sebagaimana yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan perkara *judicial review* Tap MPR terhadap UUD 1945 sebagaimana pemikiran Jimli Asshiddiqie, mempunyai kemiripan dengan lembaga *wilayah mazalim*, yang berwenang meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai maslahat umum yang tak dapat di laksanakan oleh petugas-petugas *hisbah*. Dalam kerangka hukum formil di Indonesia, *wilayah mazalim* dapat disamakan dengan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: *Judicial review*, Tap MPR, Jimli Asshiddiqie, *fiqh siyasah*

Pendahuluan

Pembentukan undang-undang merupakan suatu bagian penting yang mendapat perhatian serius. Undang-undang dalam negara hukum berfungsi sebagai hukum tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat setiap warga dan seluruh komponen kehidupan bernegara. Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh suatu negara hukum harus didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan.¹

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Implikasi dari ayat tersebut bahwa setiap kebijakan-kebijakan yang diputuskan harus mempunyai landasan hukum yang kuat. Sehingga setiap pemberlakuan peraturan perundang-undangan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya dan tersusun secara hierarki.

Undang-undang dalam arti luas atau dalam istilah Belandanya disebut *wet* (hukum dasar). *Wet* dalam hukum tata Negara Belanda, dibedakan dalam dua pengertian, yaitu: *wet in formelle zin* (undang-undang dalam arti formal) dan *wet in materiele zin* (undang-undang dalam arti materiil). Hal yang sama

¹ Muhammad Siddiq Armia, *Studi Epistimologi Perundang-undangan*, (Jakarta: CV Teratai Publisher, 2011), 13.

dikemukakan T. j. Buys, bahwa undang-undang mempunyai dua arti, yaitu:²

Pertama, undang-undang dalam arti formal, ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya (terjadinya). Misalnya, pengertian undang-undang, menurut ketentuan UUD 1945 hasil amandemen dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR.

Kedua, undang-undang dalam arti materiil ialah seperti keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

Namun demikian, pengertian undang-undang dalam arti materiil itu (*wet in materiele zin*) dapat pula kita lihat sebagai perbedaan cara pandang atau perspektif. Pengertian undang-undang dalam arti materiil itu menyangkut undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi atau substansinya, sedangkan undang-undang dalam arti formil (*wet in formele zin*) dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya.³

Sistem dan Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia telah diatur dalam Tap. MPRS No.XX/MPRS/1966, yang oleh Tap. MPR No.V/MPR/1973 dinyatakan tetap berlaku. Sumber-sumber hukum formil tersebut adalah UUD 1945, dengan tata urutan peraturan perundang-undangan meliputi:⁴

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti:

² Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 42.

³ Jimli Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 32.

⁴ Titik triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Paska Amandemen UUD 1945*, 42-43.

- a. Peraturan Menteri
- b. Instruksi Menteri
- c. Dan lain-lainnya.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pemberlakuannya harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan MPR atau MPRS yang sebagian diantaranya sampai sekarang masih berlaku sebagai peraturan yang mengikat untuk umum (*algemene verbindende voorschriften*). Dari segi bentuknya, jelas ketetapan-ketetapan MPR tersebut bukan undang-undang.⁵

Persoalan yang menjadi kendala adalah terkait pengujian norma undang-undang terhadap TAP MPR maupun TAP MPR terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Secara teoritis, pengujian norma dapat dibagi menjadi dua, pertama, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan Tap MPR dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan kedua, pengujian norma di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan di Mahkamah Agung. Akan tetapi, pengujian undang-undang terhadap TAP MPR atau pengujian TAP MPR terhadap UUD 1945 tidak atau setidaknya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.⁶

Apabila status hukum kedelapan Tap MPR tersebut tidak dapat ditentukan dengan tegas, maka keberadaan norma hukum yang terkandung di dalamnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum,⁷ meskipun MPR tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Tap MPR pasca amendemen UUD 1945, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pertentangan antara undang-undang dengan Tap MPR yang masih berlaku

⁵ Jimli Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 36.

⁶ *Pengujian atas Peraturan Perundang-Undangan*, dalam www.parlemen.net/ind/judicialreview.doc, diakses tanggal 25 Juni 2013, pukul 13.39 WIB.

⁷ Jimli Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 77.

berdasarkan Tap MPR Nomor I/MPR/2003 atau pertentangan antara Tap MPR dengan UUD 1945. Untuk menyelesaikan kasus ini, bisa menggunakan analisis terhadap semangat dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk melindungi hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh undang-undang.

Namun dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi tidak dijelaskan wewenang pengujian (*judicial review*) undang-undang terhadap Tap MPR maupun pengujian Tap MPR terhadap UUD 1945, padahal tidak menutup kemungkinan akan terjadi demikian.

Dalam hal ini, terjadinya kekosongan hukum (*recht vacuum*) pengujian (*judicial review*) undang-undang terhadap Tap MPR maupun pengujian Tap MPR terhadap UUD 1945. Sehingga perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut mengenai hal ini, karena kekosongan hukum akan mengganggu sistem hukum di Indonesia.

Sedangkan dipandang secara *fiqh siyasa*, Konstitusi disebut juga dalam bahasa Persia dengan *dusturi*. Sedangkan dalam bahasa Arab adalah *dusturi* yang memiliki arti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, *dusturi* berarti kumpulan kaidah yang mengatakan dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam arti pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk bernegara.

Tujuan Allah SWT membuat hukum adalah untuk kepentingan manusia⁸ sebagaimana tertulis dalam (QS. Adz-Dzariyat: 56-57).⁹ Allah SWT menurunkan Syari'at (hukum) Islam untuk mengatur

⁸ Muchlis Usman, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: LBB Yan's Press, 1994), 53.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma, 2009), 522.

kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat.¹⁰ Melalui syari'at Islam, Allah memberi mereka kekuasaan sebagai hak-hak asasi dan hak-hak politik untuk mendayagunakan potensi alam dan mengatur kehidupan mereka. Pada sisi lain, Dia juga mewajibkan pemerintah agar menegakkan hukum Allah dalam dan untuk mengatur kehidupan masyarakat; dan untuk itu, Diapun memberi kekuasaan politik kepada mereka.¹¹

Dalam sistem politik Islam dikenal dua jenis hukum, yakni hukum syari'at yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, dan hukum *qanuni* yang bersumber dari keputusan-keputusan lembaga pemerintahan. Secara hierarki, hukum yang tertinggi dalam sistem ini adalah hukum yang pertama, dalam kaitan ini Al-Qur'an itulah yang menjadi rujukan pokok.¹²

Dalam Islam, apa yang ada di dalam al-Qur'an dan sunnah sebagai hukum konstitusional dan etika-etika politik tinggi dianggap sesuatu yang wajib diikuti dalam pemerintahan. Al-Qur'an adalah fondasi pertama dan sumber umum Islam.¹³ Sumber hukum (dalil) lain selain al-Qur'an dan sunnah adalah *ijma'* dan *qiyas*.

Mayoritas tokoh umat Islam telah sepakat bahwa empat hal tadi dapat digunakan sebagai sumber hukum (dalil), juga sepakat bahwa urutan penggunaan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Al-Qur'an
2. Sunnah
3. *Ijma'*
4. *Qiyas*

¹⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 65.

¹¹ Abd. Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 299.

¹² Ibid.

¹³ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), 1.

¹⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terjemah, Faiz el Muttaqin, *Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amania, 2003), 13-14.

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*.¹⁵ Ada beberapa bahasan dalam *siyasah dusturiyah*, ataralain adalah konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sultan al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan undang-undang.¹⁶ Dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sultan al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, dan itu adalah wewenang *Ahlul Halli wal 'Aqdi*, adapun tugas dan wewenang *Ahlul Halli wal 'Aqdi*, adalah:¹⁷

1. Pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membai'at imam.
2. Mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
3. Mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur'an dan Hadis.
4. Tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakan.
5. Mengawasi jalannya pemerintahan.

Keseluruhan proses legislasi yang menjadikan sistem hukum Islam ini dinamis dan memungkinkan perkembangan dan evolusinya berasal dari suatu jenis riset akademis dan upaya

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 153.

¹⁶ Ibid., 161.

¹⁷ A. Jazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 76.

intelektual yang khas yang di dalam terminologi Islam terkenal dengan nama *ijtihad*.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.

Dalam sejarah Islam, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sultah al-qada'iyah*) kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah alqada'* (lembaga yang memutuskan perkara-perkara antar sesama warga, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam pelaksanaan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM, dan pada masa ini MPR dalam UUD 1945 bisa dijelaskan, sebagai lembaga tertinggi negara yang mirip dengan kekuasaan atau kedudukan sebagai lembaga *Ahl al-halli wa al-'aqdi*, yang merupakan gabungan antara fungsi *wilayah Mazalim*, yakni lembaga dalam kekhalifahan Islam yang salah satu kewenangannya adalah mengevaluasi dan menyelesaikan sengketa pemilihan Khalifah, yakni lembaga perwakilan rakyat yang para anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat. yang salah satu wewengangnya adalah membatasi jumlah calon khalifah.

Dengan demikian, setiap peraturan perundang-undangan baik dalam hukum Indonesia maupun dalam Hukum Islam harus sesuai dengan sumber hukum pokok masing-masing sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang telah ditentukan, dalam hukum Indonesia peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945 sebagai

sumber hukum tertinggi, sedangkan dalam hukum Islam sumber hukum tertinggi adalah al-Qur'an. Ketika ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan sumber hukum pokok maka harus ada pihak atau lembaga yang mempunyai wewenang menyelesaikan pertentangan tersebut.

Profil Jimli Asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie lahir di Palembang, 17 April 1956. Memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1982) dan kemudian menjadi pengajar di almamaternya itu. Pendidikan S-2 (1987) diselesaikan di Fakultas Hukum UI (1987). Gelar Doktor Ilmu Hukum diraih dari Fakultas Pasca Sarjana UI, Sandwich Program kerja sama dengan Rechts-faculteit Rijks-Universiteit dan Van Voolenhoven Institute, Leiden (1990).¹⁸

Tahun 1998 diangkat menjadi Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan dipercaya sebagai Ketua dan Penanggungjawab Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. Ia banyak mengikuti pendidikan dan pelatihan serta pertemuan internasional. Riwayat pendidikan Jimly Asshiddiqy¹⁹ adalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1982 (Sarjana Hukum), Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1984 (Magister Hukum), Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jakarta (1986-1990), dan Van Vollenhoven Institute, serta Rechts-faculteit, Universiteit Leiden, program doctor by research dalam ilmu hukum (1990), Post-Graduate Summer Refreshment Course on Legal Theories, Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, 1994. dan berbagai *short courses* lain di dalam dan luar negeri.

Sekarang ia dipercaya sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejak Juni 2012 dari lembaga yang

¹⁸ *Profil Jimli Asshiddiqie*, diakses dari <http://www.jimly.com/about>, tanggal 09 Februari 2013 pukul 21.55 WIB.

¹⁹ *Ibid.*

sebelumnya bernama Dewan kehormatan KPU yang juga ia pimpin pada tahun 2009 dan 2010. DKPP ini ia perkenalkan sebagai lembaga peradilan etika pertama dalam sejarah, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Sebelumnya ia merupakan pendiri dan menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pertama (2003–2008) dan diakui sebagai peletak dasar bagi perkembangan gagasan modernisasi peradilan di Indonesia. Sebagai akademisi, ia dikenal sangat produktif. Sampai sekarang buku karya ilmiahnya yang sudah diterbitkan tidak kurang dari 40 judul dan ratusan makalah yang tersebar di pelbagai media dan disampaikan di pelbagai forum.

Di masa Presiden Soeharto, Jimly pernah menjabat Staf Ahli Menteri Pendidikan (1993-1998) dan kemudian diangkat menjadi Asisten Wakil Presiden RI B.J. Habibie. Di masa Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati, ia kembali menjadi guru besar FHUI dan kemudian dipercaya menjadi Penasihat Ahli Menteri Perindustrian dan perdagangan (2001-2003), Tim Ahli PAH I BP-MPR (2001-2002) dan Penasihat Ahli Setjen MPR-RI dalam rangka Perubahan UUD 1945 (2002-2003).²⁰

Sebelumnya, ketika Presiden B.J. Habibie membentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani pada tahun 1998. Jimly dipercaya menjadi Ketua Kelompok Reformasi Hukum sedangkan Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Kelompok Kerja Reformasi Politik. Selain menyiapkan pelbagai bahan untuk RUU, pokja juga ditugasi untuk melakukan kajian Perubahan UUD 1945 dan kemungkinan Sistem Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Di saat genting pasca mundurnya Presiden Soeharto dan B.J. Habibie menjadi Presiden, ia dipercaya menjadi Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum yang langsung diketuai oleh Presiden dengan Ketua Harian Menkopolkam.²¹

²⁰ *Jimly Asshiddiqie*, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Jimly_Asshiddiqie, tanggal 09 Februari 2013. Pukul 21.38 WIB.

²¹ *Ibid.*

Jimly banyak terlibat dalam perancangan UU bidang politik dan hukum, dan terakhir ia aktif sebagai penasihat Pemerintah dalam penyusunan RUU tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah RUU mendapat persetujuan bersama tanggal 13 Agustus 2003, ia dipilih oleh DPR menjadi hakim konstitusi generasi pertama pada tanggal 15 Agustus 2003, dan kemudian terpilih menjadi Ketua pada tanggal 19 Agustus 2003. Ia dipercaya memimpin MK selama 2 periode (2003-2006, dan 2006-2008). Setelah masa tugasnya selesai, sampai masa pendaftaran ditutup oleh DPR, ia tidak mencalonkan diri kembali sebagai hakim konstitusi. Namun, atas desakan semua partai, ia akhirnya bersedia meskipun untuk itu masa pendaftaran calon hakim terpaksa diperpanjang untuk kemudian dilantikan kembali menjadi hakim konstitusi.²²

Namun, setelah pelantikan dan kemudian diadakan pemilihan Ketua, Jimly tidak terpilih sebagai Ketua untuk periode ketiga. Ia digantikan hakim baru, yaitu Mahfud MD yang berhenti dari DPR untuk mengabdikan diri menjadi hakim konstitusi. Setelah beberapa bulan kemudian, Jimly mengundurkan diri dari jabatan hakim konstitusi dan mulai sejak 1 Desember 2008 tidak lagi berstatus sebagai hakim. Ia merasa telah selesai melaksanakan tugas sejarah dalam membangun dan mengokohkan keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan yang modern dan tepercaya. Bahkan Ketua yang baru sudah terpilih sebagaimana mestinya untuk meneruskan estafet tugas konstitusional mengawal konstitusi. Banyak kritik yang dilontarkan atas pengunduran dirinya itu dari para anggota DPR. Namun, Pemerintah sangat menghargai jasa-jasanya dalam membangun lembaga Mahkamah Konstitusi dengan baik. Untuk itu pada bulan Agustus 2009, ia dianugerahi oleh Presiden, Bintang Mahaputera Adipradana.

Sesudah tidak lagi sebagai hakim, ia pernah dipercaya menjadi Ketua Panitia Seleksi Penasihat KPK (2009) dan Ketua

²² Ibid.

Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (2009-2010). Selain itu, ia juga diangkat menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden(Wantimpres) Bidang Hukum dan Ketatanegaraan sampai kemudian mencalonkan diri sebagai calon Ketua KPK. Ia juga aktif menjadi Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2009-sekarang). dan sejak 2013-2018 menjadi Ketua Dewan Penasihat. Aktivitas organisasinya, beliau pernah aktif di organisasi kepemudaan Pelajar Islam Indonesia (PII). Sekarang di samping mengajar, Jimly aktif mendirikan sekolah kepemimpinan politik dan hukum yang diberi nama "Jimly School of Law and Government" (JSLG) sambil terus mengabdikan kepada negara melalui pelbagai jabatan. Terakhir ia menjabat Ketua Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP), Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM, dan anggota Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan (DGTK-RI).²³

Wilayah Mazalim

Wilayah mazalim adalah peradilan yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan untuk mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan Negara.²⁴ Selain itu, lembaga ini juga memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak dari orang yang berkusa.²⁵

Secara kelembagaan, *Wilayah mazalim* merupakan kekuasaan peradilan yang lebih tinggi daripada pengadilan biasa. Sedangkan secara operasional, lembaga ini bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh *qada'* dan *muhtasib*.

Wilayah Mazalim sudah dikenal di Arab sebelum Islam. Hal ini wujud dari komitmen orang-orang Quraisy untuk menolak segala

²³ Ibid.

²⁴ Jaelani Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 168.

²⁵ Muhammad Hasby as Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 92.

bentuk kezaliman sekaligus memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi.

Kompetensi absolute²⁶ yang dimiliki oleh *wilayah mazalim* adalah memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya, seperti kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para kerabat khalifah, pegawai pemerintahan, dan hakim-hakim sehingga kekuasaan *wilayah mazalim* luas dari kekuasaan *qada'*.²⁷

Selanjutnya Al-Mawardi, dalam *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* menerangkan bahwa perkara-perkara yang di periksa oleh lembaga ini ada 10 macam :²⁸

- a. Penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan.
- b. Kecurangan pegawai-pegawai yang di tugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta kekayaan negara lain.
- c. Mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat.
Ketiga-tiga perkara tersebut di atas harus di periksa oleh lembaga mazalim apabila telah di ketahui adanya kecurangan-kecurangan dan penganiayaan-penganiayaan tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan.
- d. Pengaduan yang di ajukan oleh tentara yang di gaji lantaran gaji mereka di kurangi ataupun di lambatkan pembayarannya.
- e. Mengembalikan pada rakyat harta-harta mereka yang di rampas oleh penguasa-penguasa yang zalim.
- f. Memperhatikan harat- harta wakaf.

Jika wakaf-wakaf itu merupakan wakaf umum maka lembaga ini mengawasi berlaku tidaknya syarat-syarat oleh si pemberi

²⁶ Kompetensi absolute adalah masalah-masalah yang menjadi kewenangan suatu peradilan untuk memutuskan perkaranya, disamping kekuasaan tersebut, ada kompetensi relative yang menyangkut wilayah hukum yang menjadi kekuasaan suatu peradilan.

²⁷ A. Basiq Djali, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzan, 2012), 116.

²⁸ Imam al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sultaniyah*, terj. Fadli Bahri. *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syar'iat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006, 177.

wakaf. Adapun wakaf-wakaf yang khusus, maka lembaga ini bertindak setelah ada pengaduan dari yang bersangkutan.

- g. Melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat di laksanakan oleh hakim-hakim sendiri, lantaran orang yang di jatuhkan hukuman atasnya adalah orang – orang yang tinggi derajatnya.
- h. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai maslahat umum yang tak dapat di laksanakan oleh petugas-petugas *hisbah*.
- i. Memelihara hak-hak Allah, yaitu ibadat-ibadat yang nyata seperti jum'at, hari raya haji, dan jihad.
- j. Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa di antara pihakpihak yang bersangkutan.

Dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, maka semakin banyak pula permasalahan yang muncul dalam peradilan yang terjadi dalam masyarakat Islam, oleh karena itu perlu adanya pendampingan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang tidak cukup dengan hanya meyelenggarakan peradilan biasa, tetapi diperlukan adanya peradilan lain yang berwenang menangani permasalahan-permasalahan baru yang terjadi pada masyarakat, pada masa Bani Umayyah dibentuklah *wilayah mazalim* yang bertugas untuk menyelesaikan kasus-kasus atau perkara-perkara yg tidak dapat dilaksanakan oleh petugas hisbah dan juga petugas *qada'*.

Adapun tugas *muhtasib* (petugas hisbah) adalah menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Menurut Al-Syaqathi dalam bukunya *Fi Adaab al-Hisbah*, seperti yang dikutip oleh Plilip K. Hitty bahwa tugas *al-Muhtasib* selain mengarahkan polisi juga bertindak sebagai pengawas perdagangan dan pasar, memeriksa takaran dan timbangan serta ikut mengurus kasus-kasus perjudian, seks moral, dan busana yang tidak layak di depan umum.²⁹

²⁹ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012), 80-81.

Sedangkan tugas Qadhi (petugas *al-qada'*) adalah menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Di samping itu, badan ini juga mengatur institusi wakaf, harta anak yatim, dan orang yang cacat mental.³⁰

Untuk melengkapi lembaga peradilan yang sudah ada, maka dibentuklah satu lembaga yaitu *wilayah mazalim* yang sebagaimana disinggung di atas bahwa bertugas untuk menyelesaikan kasus-kasus atau perkara-perkara yg tidak dapat dilaksanakan oleh petugas *hisbah* dan juga petugas *qadha'*. Dalam perkembangan berikutnya *wilayah mazalim* berwenang meninjau kebijakan para pejabat pemerintahan yang lebih rendah, di sini *wilayah mazalim* memiliki kekuasaan yang lebih luas daripada hakim biasa.³¹

Menurut Ibnu Khaldun, *wilayah mazalim* merupakan urusan yang memadukan unsur kekuasaan eksekutif dengan kebijaksanaan yudikatif. Ia membutuhkan kekuasaan yang kuat dan kekuasaan yang besar untuk menguasai dan mengendalikan para pihak yang berperkara. Dalam hal ini, hakim *wilayah mazalim* perlu memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadahi melebihi kemampuan dan keterampilan yang rata-rata dimiliki hakim biasa.

Pemikiran Jimli Asshiddiqie tentang Judicial Review Tap MPR RI Terhadap UUD 1945.

Kemunculan kedudukan Tap MPR yang berada dibawah Undang-undang Dasar 1945 pasca lahirnya Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikatakan bahwa ada kewenangan MK untuk menguji Tap MPR seperti halnya kewenangan MK menguji materiil Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945.

³⁰ Ibid., 80, Lihat juga: al-Jazari, Abu Bakr Jabi, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2003), 711.

³¹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 83.

Hubungan *Verfassungsnorm* UUD 1945 dengan Norma Hukum Ketetapan MPR, apabila kita melihat teori jenjang norma hukum dari Hans Nawiasky, kita melihat bahwa Negara Republik Indonesia kelompok norma dari *staatsgrundgesetz* itu terdiri dari *Verfassungsnorm* UUD 1945 yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR, serta hukum Dasar tidak tertulis (Konvensi Ketatanegaraan).

Norma-norma hukum yang ada dalam Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara, yaitu dalam *verfassungsnorm* UUD 1945 dan dalam Ketetapan MPR, merupakan norma-norma hukum yang masih bersifat umum dan garis besar serta masih merupakan norma tunggal, jadi belum dilekati oleh sanksi pidana maupun sanksi pemaksa, tetapi kedudukan *verfassungsnorm* UUD 1945 lebih tinggi dari pada Ketetapan MPR (TAP MPR) walaupun keduanya dibentuk oleh lembaga yang sama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tinggi di Negara Republik Indonesia.

Menurut Jimli Asshiddiqie dalam ketetapan No. I/MPR/2003, MPR sendiri juga menentukan adanya sebelas ketetapan MPR/S yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang mengatur materi ketetapan-ketetapan tersebut. Artinya, kesebelas ketetapan MPR/S itu ditundukkan derajatnya oleh MPR sendiri, sehingga dapat diubah oleh atau dengan undang-undang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa MPR sendiri telah menundukkan status hukum ketetapan-ketetapan yang pernah dibuatnya setingkat dengan undang-undang, sehingga untuk selanjutnya ketetapan-ketetapan yang tersisa tersebut harus dipandang sederajat dengan undang-undang. Jika demikian halnya, maka lembaga Negara yang berwenang ada empat lembaga, yaitu DPR, Presiden, DPD dan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya masing-masing.³²

³² Jimlie Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 73.

Jika DPR dan Presiden diperkenankan menilai, mengubah, ataupun mencabut kedelapan ketetapan tersebut, mengapa Mahkamah Konstitusi tidak? Bukankah mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi itu merupakan upaya konstitusional yang disediakan oleh UUD 1945 apabila mekanisme *legislative review* tidak atau belum sempat dilaksanakan, sedangkan ketentuan di dalam suatu produk peraturan telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga Negara ataupun subyek hukum yang dilindungi hak dan kewenangan konstitusionalnya oleh UUD 1945. Bukankah diadakannya mekanisme *judicial review* itu dimaksudkan untuk mendampingi dan mengimbangi keberadaan mekanisme *legislative review* adalah merupakan keniscayaan, sehingga segala ketentuan undang-undang dapat sungguh-sungguh dijalankan dan dibentuknya Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjamin hal itu. Oleh karena itu, apabila kedelapan ketetapan MPR/S tersebut diatas dianggap dapat diubah dengan undang-undang, berarti ketetapan tersebut dapat pula diuji oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Jika ditelaah dengan seksama, ada beberapa alasan yang dapat dipakai untuk menyatakan bahwa kedudukan kedelapan Ketetapan MPR/S tersebut di atas memang dapat disetarakan dengan undang-undang, bukan dengan Undang-Undang Dasar. *Pertama*, sejak Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, MPR sendiri telah menurunkan status hukum ketetapan-ketetapan MPR warisa lama itu dalam derajat yang memang setara dengan undang-undang, bukan dengan Undang-Undang Dasar. Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 misalnya menempatkan sekian ketetapan MPR/S yang masih terus berlaku sampai materinya diatur dengan undang-undang. Dengan diaturnya hal-hal dalam ketetapan MPR/S itu oleh undang-undang, maka Ketetapan MPR/S itu tidak berlaku lagi sebagai peraturan. Misalnya, Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 ditentukan oleh Ketetapan MPR No. I/MPR/2003. Itu sebagai peraturan yang masih berlaku sampai materinya diatur

dengan undang-undang. Sehubing dengan itu, dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2011 yang memuat semua materi ketetapan MPR No. III/MPR/2000 di dalamnya, maka sejak itu ketetapan MPR tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Artinya, MPR sendiri telah menentukan bahwa derajat ketetapanya itu setara dengan undang-undang.

Kedua, kedelapan Tap MPR/S yang tersisa itu harus dianggap setara kedudukannya dengan undang-undang, karena dalam system hukum kita yang baru berdasarkan UUD 1945 memang tidak lagi dikenal adanya produk hukum diatas undang-undang tetapi dibawah undang-undang dasar. Jika kedelapan ketetapan itu bukan undang-undang dasar atau perubahan undang-undang dasar, maka demi hukum, kedudukannya harus dianggap setara dengan undang-undang, meskipun bentuk formilnya bukan undang-undang, tetapi secara materiil kedelapan Tap MPR tersebut adalah undang-undang, yaitu "*wet in materiele zin*". Namun demikian, logika yang terkandung dalam pandangan kedua ini juga dapat mendukung ide yang menempatkan kedudukan kedelapan itu setara dengan undang-undang dasar (konstitusi).

Menurut Djokosutono, konstitusi atau "*constitutie*" dapat dipahami dalam tiga arti, yaitu (i) Konstitusi dalam arti materiil (*constitutie in materiele zin*), (ii) Konstitusi dalam arti formil (*constitutie in formele zin*), dan (iii) Konstitusi dalam arti naskah yang didokumentasikan untuk kepentingan pembuktian dan kesatuan rujukan (*constitutie in gedocumenteerd voor bewijsbaar en stabiliteit*).³³ Bagaimanapun, seperti dikatakan Hermann Heller, konstitusi tidak dapat dipersempit mknanya hanya sebagai undang-undang dasar atau kanstitusi dalam arti tertulis seperti yang lazim dipahami karena pengaruh aliran kodifikasi. Di samping undang-undang dasar yang tertulis, ada pula konstitusi yang tidak tertulis yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Bahkan, seperti pengalaman di Inggris, banyak

³³ Djokosutomo, *Hukum Tata Negara, Himpunan Perkuliahan Prof. Djokosutomo oleh Prof Harun Alrasid*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 2.

naskah hukum yang dapat disebut sebagai konstitusi dalam pengertian system ketatanegaraan Inggris. Oleh sebab itu, di samping adanya pengertian konstitusi tidak tertulis ya hidup dalam praktik ketatanegaraan dan dalam kesadaran hukum masyarakat, dapat puladikatakan antara peraturan dasar yang terdapat dalam berbagai naskah yang berbeda, dan undang-undang dasar sebagai satu naskah yang konstitusi tertulis.

Dengan berpatokan dengan jalan pikiran demikian, kedelapan Ketetapan MPR/S tersebut dapat juga diperlakukan sebagai peraturan yang dikategorikan sebagai peraturan dasar. Yang dapat digolongkan sebagai peraturan dasar adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan piagam dasar seperti Piagam Hak Asasi Manusia, *Bill of Rights*, *Magna Charta*, dan sebagainya. Dengan demikian, Kedelapan Ketetapan MPR/S tersebut di atas disebut saja sebagai memiliki kedudukan yang setingkat dengan UUD 1945, yaitu dengan status sebagai bentuk peraturan semacam naskah piagam dasar itu. Sayangnya, apabila ditelaah isinya, norma-norma yang terkandung di dalam Tap MPR tersebut berisi rekomendasi mengenai kebijakan-kebijakan sangat operasional teknis atau berisi nilai-nilai etika kehidupan berbangsa yang sangat abstrak. Karena itu, kedelapannya tidak dapat diseratakan dengan UUD 1945 dan menurut Jimli lebih tepat jika kedelapan ketetapan itu dianggap sederajat dengan undang-undang, bukan dengan UUD 1945.

Ketiga, apabila status hukum kedelapan Tap MPR tersebut tidak dapat ditentukan dengan tegas, maka keberadaan norma hukum yang terkandung di dalamnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, akan tetapi, resiko yang timbul apabila kedelapannya ditafsirkan sebagai produk hukum yang setara dengan UUD 1945, pastilah lebih buruk daripada resiko yang mungkin timbul jika kedelapan ketetapan itu ditafsirkan sederajat dengan undang-undang. Semula, ketika kedelapan ketetapan MPR/S itu dibentuk, maka penetapannya cukup didukung oleh para anggota MPR dengan mekanisme suara terbanyak sesuai

dengan ketentuan Pasal 3 UUD 1945. Akan tetapi, jika statusnya sekarang dianggap setara dengan UUD 1945, maka untuk mengubah atau mencabutnya diperlukan persyaratan dukungan suara yang lebih sulit sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UUD 1945. Padahal, apabila ditinjau dari segi isinya, untuk memenuhi tuntutan perubahan zaman, materi kedelapan Tap MPR tersebut jauh lebih memerlukan sifat keterbukaan dan fleksibilitas dibandingkan dengan materi undang-undang dasar, sehingga karena itu memerlukan mekanisme perubahan yang lebih sederhana dibandingkan dengan materi UUD 1945.³⁴

Selanjutnya menurut Jimli bahwa meskipun berbentuk ketetapan MPR/S, tetapi berisi norma-norma hukum yang setara dengan materi undang-undang, karena itu, ketetapan MPR yang masih berlaku sampai saat ini dapat dikatakan sebagai undang-undang dalam arti materiil (*wet in materiel zin*).³⁵ Oleh karena itu, ketika Ketetapan MPR/S dinilai telah menimbulkan kerugian hak konstitusional pihak-pihak tertentu, maka dapat diujiakan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai perkara pengujian konstitusional, dalam hal ini mekanisme yang ditempuh adalah mekanisme *judicial review* sebagaimana yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Analisa Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Jimly Asshiddiqie Tentang *Judicial Review* Tap MPR Terhadap UUD 1945

Dalam fiqh siyasah, Abd al-Wahhab Khalaf menjelaskan kekuasaan Negara dibedakan menjadi tiga: legislatif (*al-sultah al-tasyri'iyah*) yang merupakan kekuasaan pembentukan undang-undang, yudikatif (*al-sultah al-qada'iyah*) yang merupakan kekuasaan badan peradilan, dan eksekutif (*al-sultah al-tanfiz'iyah*) merupakan kekuasaan sebagai pelaksana undang-undang.³⁶

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 78.

³⁵ Ibid., 79.

³⁶ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 161.

Selanjutnya Khalaf menjelaskan bahwa *khalifah* memegang tiga kekuasaan ini. Ia berhak membuat undang-undang, dan dapat bertindak sebagai hakim (*qadly*). Dalam pelaksanaannya, wewenang tersebut dapat dilimpahkan. Kewenangan legislatif ditangani oleh para *mujtahid* dan *mufti*, kewenangan yudikatif dilaksanakan oleh para hakim dan kewenangan eksekutif ditangani oleh *khalifah*, para sultan dan perangkat pemerintah di bawahnya.

Fathi Utsman memiliki gagasan yang agak berbeda dengan Abd al-Wahhab khalaf. Fathi Utsman menjelaskan bahwa kekuasaan pembentukan hukum dan undang-undang dalam negara Islam (legislatif) berada ditangan para *mujtahid* dan *ahl al-halli wa al-aqd*, kekuasaan peradilan (yudikatif) berada di tangan para hakim, dan kekuasaan pemerintahan (eksekutif) berada ditangan *khalifah* dan para pemimpin dibawahnya.

Sebenarnya pembagian kekuasaan, dengan beberapa kekhususan dan perbedaan, telah terdapat dalam pemerintahan islam jauh sebelumnya pemikir-pemikir barat merumuskan teori mereka tentang *trias politica*. Ketiga kekuasaan tersebut, telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad di Madinah. Sebagai kepala negara, Nabi membagi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu menguasai bidang-bidangnya. Meskipun secara umum, semuanya bermuara kepada Nabi juga. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan tugas-tugas tersebut pun berkembang dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa dan tempat.

Jadi kekuasaan yudikatif dalam peradilan Islam mempunyai kemiripan wewenang dan fungsi Mahkamah Konstitusi seperti dalam *wilayah Mazalim* yang merupakan lembaga peradilan yang mempunyai wewenang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam pelaksanaan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM.

Wilayah Mazalim adalah kekuasaan dalam bidang pengadilan, yang lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim dan kekuasaan *muhtasib*. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak termasuk dalam wewenang hakim biasa. Sehingga dari perkara-perkara yang diperiksa dalam lembaga *wilayah mazalim* adalah perkara-perkara yang diajukan oleh seseorang yang teraniaya dan sebagiannya pula tidak memerlukan pengaduan dari yang bersangkutan, tetapi memang jadi wewenang lembaga ini untuk memeriksanya.

Jabatan hakim *wilayah mazalim* adalah oleh ahli-ahli fiqh *mujtahid*. Mereka memutuskan perkara berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Karenanya kekuasaan hakim ini mutlak dan bebas dari pengaruh pihak lain, termasuk *khalifah* sekalipun. Dalam hal ini, *khalifah* hanya mengawasi dan mengontrol pekerjaan hakim. Jika terdapat hakim yang melanggar dan menyimpang dari tugasnya, maka *khalifah* segera memecatnya. Keputusan hakim pun mengikat dan wajib dipatuhi oleh para pejabat-pejabat lain seperti para pegawai perpajakan.

Adapun beberapa perkara sengketa yang perlu ditangani oleh hakim di lembaga *mazalim*, seperti pada perkara yang masuk di *wilayah mazalim* yaitu; perkara yang diajukan, dan ada pula perkara yang tidak menunggu pengajuan, tetapi lembaga ini memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memutuskan perkara atau perselisihan yang terjadi antara penguasa terhadap rakyat dan penyelewengan.

Mereka menentukan hari-hari tertentu untuk menerima pengaduan rakyat terhadap para pejabat negara. Pengadilan untuk memutuskan perkara-perkara kezaliman, pada masa itu dilakukan di masjid-masjid. Akan tetapi penguasa yang mengetahui sidang *mazalim* ini dilengkapi dengan bermacam-macam aparat agar pengadilannya mempunyai kewibawaan yang penuh dan dapat melaksanakan putusan-putusannya.

Pegawai-pegawai *Mazalim* merupakan pengawal dan penjaga yang akan bertindak terhadap seseorang yang membangkang di

dalam pemeriksaan, dilengkapi pula oleh ahli-ahli fiqh untuk ditanyakan pendapat oleh panitera untuk mencatat segala keterangan yang diberikan oleh masing-masing pihak, dan dilengkapi juga dengan orang-orang yang dapat dijadikan sebagai saksi untuk dipergunakan di masa persidangan memerlukan saksi sebagai orang-orang yang diminta persaksiannya untuk menyaksikan putusan-putusan yang diberikan oleh ketua pengadilan *mazalim*.

Wilayah mazalim dalam prosedur menyelesaikan sengketa terhadap kezaliman para penguasa pada masa Rasul, beliau sendirilah yang menyelesaikan segala sengketa yang timbul dalam pemerintahannya. Dengan demikian dapatlah kita menetapkan, bahwa *hakim pertama* dalam islam, ialah Rasulullah sendiri. Sengketa yang ditangani langsung oleh Rasulullah mencakup segala hal.

Alat bukti di zaman Rasulullah SAW:

1. Bayyinah (fakta kebenaran),
2. Sumpah,
3. Saksi,
4. Bukti tertulis,
5. Firasat,
6. Qur'ah (undian) dan lain-lain.

Keterangan pembuktian itu, diminta kepada penggugat untuk bersumpah yang dikenakan atas teregugat. Kemudian Nabi SAW memutuskan dengan adanya alat bukti yang kuat, bahwa Nabi SAW tidak pernah memihak kepada sesuatu golongan, beliau tetap memelihara keadilan dan kejujuran.

Di kerajaan Saudi Arabia, dewasa ini dikenal lembaga *mazalim*, yang memiliki strata sosial yang terhormat. Menurut Al-Hafnawy, kedudukan lembaga *mazalim*, tersebut lebih tinggi daripada lembaga-lembaga peradilan lainnya. Lembaga ini dikepalai oleh *nadhir al-mazalim*, yang memiliki kedudukan dan derajat yang sama dengan menteri, secara langsung ia

bertanggung jawab kepada baginda raja, dan tidak bertanggung jawab kepada menteri kehakiman.³⁷

Dengan mengamati perkembangan peradilan *mazalim* yang terjadi dinegara-negara Islam dari masa ke masa, dapat diketahui bahwa peradilan *mazalim* itu dikawal langsung oleh khalifah sendiri.

Dari beberapa analisis di atas, jika dihubungkan dengan lembaga Islam tersebut, dengan lembaga Mahkamah Konstitusi pada saat ini, hampir mempunyai kesamaan visi dalam hal fungsi dan wewenangnya yakni sebagai lembaga control yang berfungsi sebagai penampung aspirasi umat terhadap produk lembaga legislative yang dihasilkan oleh badan tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Sunah Rasul serta hak asasi manusia. Dan jika dihubungkan tentang lembaga Islam tersebut, dengan lembaga Mahkamah Konstitusi pada saat ini. Mempunyai fungsi yang hampir sama dan tidak bertentangan dalam menyelesaikan sengketa, karena lembaga keduanya merupakan lembaga yudikatif yang merupakan anspirasi umat dan kemaslahatan umat.

Penutup

Menurut Jimli Asshiddiqie, kedelapan Tap MPR/S yang tersisa itu harus dianggap setara kedudukannya dengan undang-undang, karena dalam system hukum kita memang tidak lagi dikenal adanya produk hukum diatas undang-undang, meskipun bentuk formilnya bukan undang-undang, tetapi secara materiil kedelapan Tap MPR tersebut adalah undang-undang. Dan ketika Ketetapan MPR/S dinilai telah menimbulkan kerugian hak konstitusional pihak-pihak tertentu, maka dapat diujiakan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai perkara pengujian konstitusional, dalam hal ini mekanisme yang ditempuh adalah mekanisme *judicial review* sebagaimana yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

³⁷ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 70.

Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan perkara *judicial review* Tap MPR terhadap UUD 1945 sebagaimana pemikiran Jimli Asshiddiqie, mempunyai kemiripan dengan lembaga *wilayah mazalim*, yang berwenang meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai maslahat umum yang tak dapat di laksanakan oleh petugas-petugas *hisbah*. Dengan demikian, Dalam kerangka hukum formil di Indonesia, *wilayah mazalim* dapat disamakan dengan Mahkamah Konstitusi.

Daftar Pustaka

- Anonim. *Pengujian atas Peraturan Perundang-Undangan*, dalam www.parlemen.net/ind/judicialreview.doc, diakses tanggal 25 Juni 2013, pukul 13.39 WIB.
- Aripin, Jaelani. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Armia, Muhammadiyah Siddiq. *Studi Epistimologi Perundang-undangan*. Jakarta: CV Teratai Publisher, 2011.
- Asshiddiqie, Jimli. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. 3. Jakarta: PT RahaGrafindo Persada, 2011.
- Asshiddiqie, Jimlie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma, 2009.
- Djali, A. Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzan, 2012.
- Djokosutomo. *Hukum Tata Negara, Himpunan Perkuliahan Prof. Djokosutomo oleh Prof Harun Alrasid*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Himpunan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR-RI Berdasarkan Ketetapan MPR-RI No. I/MPR/Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan

- Ketetapan MPR-RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR, 2003.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Jazari (al-), Abu Bakr Jabi. *Ensiklopedi Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2003.
- Jazuli, A. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Jimli Asshiddiqie, http://id.wikipedia.org/wiki/Jimly_Asshiddiqie, tanggal 09 Pebruari 2013. Pukul 21.38 WIB.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqin. *Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Purtaka Amania, 2003.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Mawardi (al-), Imam. *Al-Ahkam As-Sultaniyah*, terj. Fadli Bahri. *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syar'iat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Profil Jimli Asshiddiqie*, diakses dari <http://www.jimly.com/about>, tanggal 09 Pebruari 2013 pukul 21.55 WIB.
- Salim, Abd. Mu'in. *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Salman. *Pengujian Undang-Undang terhadap Tap MPR/S*, diakses dari salmantabir.wordpress.com, tanggal 12 Juli 2013, pukul 10.00 WIB.
- Shiddieqy (Ash), Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Tutik, Titik Triwulan. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Usman, Muchlis. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: LBB Yan's Press, 1994.

Usman, Suparman. *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.